



## Akuntabilitas Publik Era Digital di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan

*Public Accountability in Indonesia's Digital Era: An Analysis of Opportunities and Challenges*

Asrida<sup>1\*</sup>, Miya Nurohmah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

\*Author correspondence: [asrida@unm.ac.id](mailto:asrida@unm.ac.id)

### ARTICLE INFO

**Article History:**

**Submitted:**

2025-11-11

**Revised:**

2025-11-24

**Accepted:**

2025-11-25

**Published:**

2025-12-01

**Keywords:** public accountability; digitalization; opportunities; challenges

**Kata kunci:** akuntabilitas publik; digitalisasi; peluang; tantangan

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### ABSTRACT

Digital transformation has brought significant changes to governance by encouraging the creation of more efficient, transparent, and accountable systems. This study aims to analyze the opportunities and challenges of public accountability in the digital era. This study uses a qualitative method with a literature study approach that examines various academic sources and previous research results regarding the use of digital technology to increase transparency, public participation, and the effectiveness of government services. The results of this study found that digitalization opens up significant opportunities to strengthen public accountability through increased information transparency, public participation in oversight, efficiency of public services, and fostering public trust in the government. However, there are other findings in the implementation of digitalization facing several challenges such as the digital divide between regions, low digital literacy of officials and the public, data security and privacy, resistance to bureaucratic culture, regulatory inconsistencies, and the rise of disinformation in the digital space. To address these challenges, the implications of this study are the need for strategic innovation through strengthening regulations and national digital standards, continuously increasing digital literacy, equitable distribution of technological infrastructure across all regions, and the development of a reliable cybersecurity system through the application of technologies such as Blockchain, big data analytics, and multi-factor authentication. In addition, international collaboration with global cyber defense centers such as the NATO CCDCOE to strengthen national digital security capacity to create a more transparent, responsive, and sustainable public accountability system.

### ABSTRAK

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dengan mendorong

---

*terciptanya sistem yang lebih efisien, transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan akuntabilitas publik dalam era digitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang menelaah berbagai sumber akademik dan hasil penelitian terdahulu mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam peningkatan transparansi, partisipasi publik, serta efektivitas pelayanan pemerintah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi membuka peluang besar dalam memperkuat akuntabilitas publik melalui peningkatan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, efisiensi pelayanan publik, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun demikian, terdapat penemuan lain pada implementasi digitalisasi menghadapi sejumlah tantangan seperti kesenjangan digital antar wilayah, rendahnya literasi digital aparat dan masyarakat, keamanan data dan privasi, resistensi budaya birokrasi, ketidaksinkronan regulasi, serta maraknya disinformasi di ruang digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, implikasi dari penelitian ini yaitu dibutuhkan inovasi strategi melalui penguatan regulasi dan standar nasional digital, peningkatan literasi digital secara berkelanjutan, pemerataan infrastruktur teknologi di seluruh daerah, serta pengembangan sistem keamanan siber yang andal dengan penerapan teknologi seperti Blockchain, big data analytics, dan multi-factor authentication. Selain itu, kolaborasi internasional dengan pusat pertahanan siber global seperti NATO CCDCOE untuk memperkuat kapasitas keamanan digital nasional sehingga terbentuk sistem akuntabilitas publik yang lebih transparan, responsif dan berkelanjutan.*

---

## **Pendahuluan**

*Good Governance* merupakan hal yang paling penting dalam Pembangunan kepercayaan publik karena pada dasarnya good governance salah satu faktor yang mendasari terbentuknya akuntabilitas. Pada era digitalisasi, konsep akuntabilitas publik mengalami transformasi yang sangat mendalam, akuntabilitas publik menekankan pada transparansi dan kewajiban pertanggungjawaban terhadap pelaku atau pemangku kebijakan seperti pejabat, lembaga atau organisasi dengan output yang dihasilkan adalah pertanggungjawaban kepada publik. Oleh sebab itu, akuntabilitas merupakan fondasi bagi kepercayaan dan transparansi serta kualitas layanan dalam tata kelola pemerintahan. Menurut Budiardjo (2008) akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah (atau pihak yang diberi mandat) untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala Tindakan dan kebijakan yang dilakukannya kepada publik atau lembaga yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas tidak hanya berbicara terkait pertanggungjawaban keuangan atau anggaran tetapi semua hal yang berkaitan dengan kebijakan, keputusan, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan. Dengan adanya akuntabilitas diharapkan segala bentuk pertanggungjawaban dapat dipantau dan dievaluasi. Akuntabilitas dalam sektor pemerintahan menjadi hal

---

yang sangat penting karena menyangkut transparansi, membangun kepercayaan publik dan menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan akan menghasilkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi dalam mengawasi, menilai bahkan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Pengguna internet di Indonesia tahun 2025 semester pertama mencapai 229.428.417 yang setara dengan kurang lebih 80,66% dari total populasi di Indonesia, jumlah tersebut meningkat 1,16% dari tahun sebelumnya (sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Besarnya pengguna internet dari tahun ke tahun yang terus meningkat memaksa pemerintah untuk beralih ke teknologi. Digitalisasi merupakan alat yang dapat membantu dalam memudahkan segala bentuk pertanggungjawaban dengan kemudahan akses yang diberikan kepada *stakeholder* mulai dari kemudahan mengakses laporan, pelayanan serta kemudahan terhadap penerimaan pelayanan. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam akuntabilitas salah satunya digitalisasi dan otomatisasi akuntansi yang memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi, mengurangi kesalahan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik serta kemudahan aksesibilitas data. Kesenjangan transformasi digitalisasi menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pihak-pihak terkait.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas transformasi akuntabilitas publik melalui digitalisasi (seperti dalam studi literatur tentang transparansi dan partisipasi masyarakat), terdapat beberapa celah (*gap*) yang belum terjawab secara memadai, terutama dalam konteks Indonesia. Pertama, banyak penelitian fokus pada aspek teknis digitalisasi, seperti penerapan e-government atau otomatisasi akuntansi, namun kurang mengeksplorasi dampak empiris jangka panjang terhadap kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Kedua, ada kekurangan dalam penelitian yang mengintegrasikan faktor sosial-budaya, seperti resistensi birokrasi atau literasi digital rendah di daerah pedesaan, yang sering diabaikan dalam model global yang tidak disesuaikan dengan realitas Indonesia. Ketiga, penelitian tentang tantangan keamanan data dan disinformasi masih terbatas pada aspek teknis, tanpa kajian mendalam tentang implikasi regulasi nasional versus internasional, seperti kolaborasi dengan entitas global seperti NATO CCDCOE.

Gap ini membuka peluang untuk penelitian empiris yang lebih komprehensif, termasuk survei lapangan dan analisis kasus di Indonesia, untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas secara mendalam terkait akuntabilitas publik dalam era digital, tantangan yang akan dihadapi serta peluang yang ada serta memberikan rekomendasi dalam meningkatkan akuntabilitas publik yang lebih efisien dan efektif.

## **Kajian Literatur**

### ***Pengertian Akuntabilitas Publik***

Menurut Dwiyanto (2006) "Akuntabilitas publik adalah kewajiban lembaga publik untuk bertindak secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atas setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan yang diambil". Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah atau lembaga publik atau yang diberi mandat dalam menjawab, melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas baik secara hukum, moral maupun administrasi kepada masyarakat umum. Menurut Mappisabbi, Haris, & Zuhri (2024) Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

### ***Transformasi Digital dalam Sektor Publik***

Transformasi digital dari era konvensional ke digitalisasi membawa perubahan yang sangat signifikan seperti partisipasi publik yang lebih dilibatkan dalam pemberian kritik dan saran sehingga ada keterlibatan dua arah antara masyarakat dengan pemerintah. Era digital diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih mudah dan tidak berbelit-belit serta segala bentuk laporan dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya, contohnya layanan online kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Transformasi tidak sekedar melakukan digitalisasi atau mengubah dokumen menjadi format elektronik tetapi mencakup restrukturisasi proses bisnis, inovasi pelayanan, penguatan tata kelola, dan perubahan budaya birokrasi ke arah yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintah modern, transformasi digital menjadi strategi utama untuk menghadapi tuntutan publik yang semakin kompleks, kebutuhan akan transparansi, peningkatan akuntabilitas serta percepatan arus informasi global. Pemerintahan digital kini dipandang sebagai indikator efektivitas dan kemajuan negara dalam melayani masyarakat pada umumnya. Kemajuan internet, *smartphone*, kecerdasan buatan membuka peluang bagi sektor pemerintah untuk bisa beralih ke digitalisasi dengan tuntutan masyarakat modern pelayanan yang lebih mudah, cepat, murah dan bisa diakses kapan saja sehingga layanan yang lambat dianggap tidak relevan lagi.

### ***Digitalisasi dalam Akuntabilitas Publik***

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan salah satu alasan digitalisasi dalam akuntabilitas publik memberikan dampak yang signifikan terhadap keterbukaan laporan dan pertanggungjawaban kepada khalayak umum. Hampir seluruh sektor terdampak termasuk sektor publik/pemerintah yang menimbulkan perubahan-perubahan sehingga menghadirkan peluang dan tantangan yang baru bagi pemerintah dan lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan berbagai jenis pelaporan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi mendorong pemerintah untuk beralih dari sistem manual menuju sistem yang berbasis digitalisasi yang memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam era digitalisasi, akuntabilitas publik mengalami perubahan bukan hanya fokus pada kepatuhan administrasi tetapi lebih kepada akuntabilitas kinerja yang menekankan pada hasil nyata kepada masyarakat dari yang tertutup ke transparan melalui berbagai cara dengan menciptakan *platform* seperti e-

*government*, open data dan *e-budgeting* dengan melibatkan masyarakat bukan hanya sebagai pengguna pelayanan tetapi sebagai pengawas dan penilai kinerja yang dapat didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti *Artificial Intelligence*, *blockchain*, dan big data untuk memperkuat monitoring dan transparansi. Sistem digital juga mengurangi proses birokrasi yang rumit, mempermudah pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, teknologi mampu mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan akurasi informasi, dan membangun kepercayaan masyarakat (Rajagukguk, et al., 2025).

### **Metode Penelitian**

Peneliti mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan studi literatur (*literature review*). Metode penelitian ini bertujuan memaparkan dan menganalisa penggunaan teknologi dalam akuntabilitas publik. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai jurnal ilmiah, laporan penelitian dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai basis data akademik terpercaya yang diperlukan, misalnya Google Scholar, Scopus, Sinta (*Science and Technology Index Indonesia*), dan Garuda (Garba Rujukan Digital) untuk memastikan relevansi dengan konteks Indonesia dan global. Rentang tahun publikasi literatur yang digunakan adalah dari 2015 hingga 2024, untuk menangkap tren terkini dalam digitalisasi pemerintahan dan akuntabilitas publik, sambil tetap merujuk pada karya klasik yang relevan sebelumnya jika diperlukan. Analisis data dilakukan melalui thematic analysis, di mana data dari sumber literatur dikategorikan berdasarkan tema utama seperti peluang digitalisasi, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan. Proses ini melibatkan identifikasi pola, pengelompokan tema, dan sintesis temuan untuk menghasilkan wawasan mendalam tentang akuntabilitas publik dalam era digital di Indonesia.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Peluang Akuntabilitas Publik Dalam Era Digital***

Keberhasilan beberapa negara dalam penerapan digitalisasi pada akuntabilitas publik membuktikan bahwa digitalisasi membantu menjadi lebih efisien, transparan dan akuntabel. Digitalisasi bertujuan untuk mengubah cara kerja pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik salah satunya contohnya pada pengelolaan keuangan yang memudahkan dalam penyusunan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Dengan otomatisasi dan sistem yang terintegrasi, proses pelaporan menjadi lebih cepat, mengurangi kesalahan manusia, dan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Selain itu, teknologi memungkinkan pemerintah menganalisis data keuangan dan non keuangan dengan lebih baik, sehingga pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan menjadi lebih efektif. Penggunaan kecerdasan buatan dan analitik data juga membantu membuat laporan keuangan lebih akurat dan mempercepat penyampaian informasi (Rajagukguk, et al., 2025). Digitalisasi dalam pemerintahan memungkinkan peningkatan kualitas layanan publik seperti pengurusan izin, pajak daerah atau pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan secara online, sistem pelayanan publik berbasis digital juga mengurangi antrean dan birokrasi yang rumit (Kurniawan, 2025). Penerapan teknologi digital telah

menjadi salah satu pendorong utama perubahan berbagai sektor termasuk pelayanan publik, pemerintah khususnya di tingkat daerah menghadapi tuntutan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, transparan dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat (Hasanah, Andaryani, Dwikurniawati, & Lestari, 2024). Era digital memberikan peluang yang begitu besar dalam administrasi publik yaitu:

#### *Transparansi Lebih Tinggi*

Era digitalisasi membawa peluang yang begitu besar terhadap pertumbuhan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu administrasi publik, munculnya berbagai macam platform seperti LAPOR, JAGA KPK, e-Budgetting, e-procurement, aplikasi smart city dan sebagainya memudahkan *stakeholder* dalam membuat pertanggungjawaban terhadap masyarakat pada umumnya serta terciptanya transparansi yang lebih tinggi dikarenakan terjadi komunikasi dua pihak antara pemangku kebijakan dan pengguna kebijakan. Adanya berbagai platform tersebut memungkinkan perubahan pandangan dari sistem birokrasi konvensional yang tertutup menuju birokrasi yang transparan dan partisipatif. Hal ini didukung oleh regulasi yang mendukung keterbukaan atau transparansi informasi publik yang memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Teknologi informasi dan komunikasi telah menimbulkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam tata kelola pemerintahan (Aprilia, Wulandari, & Elcaputera, 2024).

#### *Partisipasi Publik yang lebih luas*

Pemanfaatan teknologi digital melalui berbagai platform memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi seperti anggaran, penggunaan dana publik dan platform pengaduan masyarakat (*online complaint system*) seperti portal LAPOR dan Jaga KPK merupakan kanal pengaduan masyarakat ke pemerintah sehingga masyarakat dapat dengan cepat memberikan masukan atau melaporkan penyimpangan yang memberikan dampak dalam memperkuat *public control* terhadap pemerintah. Merujuk dalam hal platform jaga KPK, masyarakat memiliki hak untuk membantu pemerintah dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana dalam hal ini berfokus pada korupsi, serta hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani kasus korupsi (Aprilia, Wulandari, & Elcaputera, 2024). Partisipasi publik memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan akuntabilitas publik dikarenakan memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun ide inovatif secara langsung. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal tetapi juga oleh masyarakat sipil secara aktif untuk memperkuat legitimasi kebijakan publik dan mampu meningkatkan pelayanan pemerintah.

#### *Efisiensi dan efektivitas pelayanan*

Salah satu tujuan transformasi digital adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dengan munculnya berbagai macam platform diharapkan mampu mengatasi proses pelayanan yang lambat dan berbelit-belit.

Digitalisasi pelayanan publik memiliki sejumlah keuntungan seperti memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan, meningkatkan transparansi pemerintah, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan (Irfan & Anirwan, 2023). Pelayanan publik pada zaman digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, pemanfaatan teknologi digital seperti platform daring dan aplikasi berbasis teknologi informasi telah membuka peluang baru dalam penyelenggaraan layanan publik yang lebih efisien dan terbuka (Alim & Ibrahim, 2024). Penggunaan teknologi informasi tentunya dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi untuk meningkatkan atau mendapatkan sebuah transparansi dan akuntabilitas dari instansi pemerintah, selain itu penyelenggaraan pemerintah berbasis digital yang memanfaatkan teknologi memiliki tujuan mendukung semua kegiatan pemerintah dengan harapan agar semua hal yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai dengan salah satu aspek penting dalam *Governance* (Wardana & Prabawati, 2024). Kunci pelayanan yang baik di era digitalisasi adalah komitmen yang kuat dari pemerintah, partisipasi aktif dari masyarakat, dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dengan menerapkan strategi yang tepat dan mengatasi berbagai tantangan, pelayanan publik di Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dapat menjadi lebih mudah diakses, cepat, akurat, transparan, akuntabel, dan tata kelola pemerintah yang lebih baik (Natika, 2024)

#### *Meningkatkan kepercayaan publik*

Akuntabilitas publik pada era digital melibatkan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu melalui alat digital yang dipercaya dapat menumbuhkan kepercayaan publik. Dengan adanya digitalisasi diharapkan mampu memfasilitasi akses informasi yang lebih cepat dan akurat serta mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat karena urgensi kepercayaan publik sangat erat kaitannya terhadap keberhasilan *good governance*. Ketika institusi pemerintah dan para pejabatnya memiliki kredibilitas yang tinggi dalam pengambilan kebijakan maka kepercayaan publik akan dapat dipertahankan dan ditingkatkan keberadaannya, kredibilitas dalam pengambilan kebijakan terjadi ketika kriteria yang digunakan untuk menentukan pilihan kebijakan tidak dipertanyakan kebenarannya dan ketepatannya oleh para pemangku kepentingan (Daraba, 2019).

#### *Pengawasan lebih kuat dan terdesentralisasi*

Hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks akuntabilitas publik sangat erat kaitannya terhadap pengawasan, dimana masyarakat sebagai media pengawas. Pengawasan lebih kuat mengacu pada monitoring lebih lanjut terhadap kinerja program pemerintah menggunakan alat digital seperti dashboard *real-time*, *Artificial Intelligence*, dan analitik big data. Salah satu keunggulan utama pengawasan di era digital adalah meningkatnya akurasi informasi, pemerintah saat ini dapat memanfaatkan berbagai platform dan teknologi seperti big data, *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), dan sistem informasi terintegrasi untuk melakukan pemantauan yang lebih menyeluruh. Selain peningkatan akurasi, era digital juga membuka ruang

desentralisasi pengawasan, dimana pengawasan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat melainkan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, media dan lembaga independen. Pengawasan yang lebih akurat dan terdesentralisasi menjadi peluang besar dalam peningkatan akuntabilitas publik, data yang disajikan mudah diakses, partisipasi masyarakat dan sistem pengawasan menjadi lebih cepat serta objektif. Hal ini memperkuat fondasi pemerintahan yang transparan, responsif, dan bebas praktik penyimpangan.

Dari pembahasan di atas, pada umumnya digitalisasi memberikan peluang yang sangat baik dalam proses akuntabilitas sehingga ada beberapa *platform* yang harus lebih dikembangkan lagi seperti LAPOR, JAGA KPK, *e-Budgetting*, *e-procurement*.

### ***Tantangan Akuntabilitas Publik Dalam Era Digitalisasi***

#### ***Kesenjangan Digital (Digital Divide)***

Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan infrastruktur digital antar daerah, tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai atau perangkat teknologi yang mendukung. Daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas digital yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan atau terpencil. Akibatnya, penerapan sistem digital untuk mendukung akuntabilitas tidak dapat berjalan merata, hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses informasi publik yang pada akhirnya dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Meskipun teknologi digital membuka ruang partisipasi publik tidak semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta. Kelompok masyarakat marginal, pedesaan, lansia atau berpendidikan rendah seringkali tertinggal dalam proses ini sehingga pengawasan hanya dilakukan oleh kelompok tertentu

#### ***Rendahnya Literasi Digital***

Transformasi digital membutuhkan aparatur negara yang kompeten dalam teknologi informasi, hal yang lain yang mempengaruhi adalah banyaknya masyarakat yang belum memahami cara menggunakan platform digital untuk mengakses informasi publik atau berpartisipasi langsung dalam pengawasan. Keterbatasan kapasitas aparatur menyebabkan pemanfaatan teknologi tidak optimal dan menghambat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah secara langsung. Rendahnya literasi digital aparatur memperlambat adaptasi terhadap sistem digital, kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan menyebabkan aparatur kesulitan menggunakan teknologi informasi secara optimal (Dunggio, Mahmud, & Sihira, 2025).

#### ***Keamanan Data dan Privasi***

Isu krusial dalam tantangan akuntabilitas publik dalam era digital adalah keamanan data, pemerintah mengelola berbagai informasi sensitif mulai dari keuangan publik hingga data pribadi masyarakat. Ketika sistem pengelolaan digital tidak dilengkapi dengan keamanan siber yang kuat maka akan muncul berbagai resiko seperti kebocoran data, penyalahgunaan data publik, serangan siber (*cyber attack*) dan manipulasi data anggaran atau kinerja. Kebocoran data

dapat mempengaruhi dan merusak kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan melemahkan akuntabilitas publik. Dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI), data pribadi masyarakat seringkali menjadi bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat, namun pengumpulan dan pemrosesan data tersebut dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi jika tidak dikelola dengan baik, kasus kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi individu menjadi contoh nyata bahwa perlindungan terhadap privasi data masih menjadi isu penting yang perlu diatasi oleh pemerintah (Faisal, 2025).

#### *Resistensi Budaya Birokrasi*

Tidak semua aparat pemerintah siap menerima keterbukaan informasi. Dalam beberapa kasus, digitalisasi dianggap sebagai ancaman bagi kelompok tertentu yang selama ini menikmati sistem konvensional sehingga menimbulkan resistensi birokrasi seperti menunda atau menghambat penerapan teknologi, tidak memperbarui data secara konsisten, memanipulasi sistem digital untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Akibatnya, sistem digital tidak transparan dan hanya menjadi formalitas.

#### *Tantangan Regulasi dan Kebijakan*

Banyak regulasi terkait akuntabilitas publik belum sepenuhnya mengakomodasi transformasi digital misalnya aturan tentang pelaporan, keamanan data, dan bukti digital sering kali belum jelas atau masih bersifat umum. Kurangnya keseragaman dalam penyajian terkait anggaran di berbagai tingkat pemerintahan menjadi salah satu hambatan, meskipun pemerintah pusat telah menerapkan sistem keterbukaan yang cukup baik masih banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi kebijakan yang sama, akibatnya masyarakat di beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi anggaran yang seharusnya bersifat terbuka untuk publik (Nababan, Sagala, Aloma, & Manalu, 2025).

#### *Overload Informasi*

Dalam era digital yang penuh dengan informasi, fenomena *hoax* telah menjadi isu global yang serius, *hoax* menyebar cepat melalui sosial dan platform digital, memanipulasi emosi manusia seperti ketakutan, kemarahan dan kebingungan yang pada akhirnya mengancam persatuan dan keamanan masyarakat (Gobang, Seran, Berun, & Satyawardana, 2024). Informasi yang tidak valid dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah sehingga mengganggu proses pengawasan dan menciptakan ketegangan sosial. Tidak jarang

#### *Inovasi dalam Sistem Akuntabilitas*

Akuntabilitas dalam era digital memberikan berbagai macam peluang dan tantangan, terlepas dari banyaknya peluang yang dapat memudahkan akses dan transparansi, fokus utama yang perlu diperhatikan adalah tantangan akuntabilitas publik di era digital. Ada beberapa tantangan yang ditemukan yaitu kesenjangan digital, rendahnya literasi digital, keamanan data dan privasi, tantangan regulasi dan kebijakan serta overload informasi. Keberhasilan beberapa negara dalam

mengatasi berbagai macam hambatan yang dialami dalam era digitalisasi khususnya negara Estonia yang mana sebagai pelopor pemeritahan digital memiliki strategi keberhasilan dengan menciptakan berbagai macam platform seperti *e-ID*, *X-Road*, *Cyber defence*, dan Transparansi *Real Time*. Hal tersebut memungkinkan untuk bisa diadopsi dan lebih dikembangkan dalam meminimalisir berbagai macam hambatan.

Hal lain yang diperlukan dalam mengatasi tantangan digital dengan melakukan penguatan regulasi dan standar nasional digital sehingga sistem informasi antarlembaga dapat terhubung dan mendukung regulasi terpusat, menyelenggarakan pelatihan literasi digital secara berkala sehingga antara aparatur dengan masyarakat bisa berperan aktif dalam mendukung pemerintahan era digital, memperluas jaringan internet dan infrastruktur digital terutama di daerah terpencil, membangun sistem keamanan siber nasional yang kuat (*Cyber defence*) seperti *Blockchain* atau *big data analytic* dan *data embassy* sehingga keamanan dan privasi lebih terjaga dikarenakan sistem tersebut tidak berfokus pada satu server saja atau menempatkan server di negara lain sehingga jika terjadi penyerangan data (*hacker*) tidak merusak seluruh, menerapkan data *encryption* atau *multi-factor authenticantion*, mengembangkan platform *Real Time* serta bergabung dalam pusat-pusat kolaborasi keamanan siber internasional seperti NATO CCDCOE (*Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence*).

Inovasi tersebut harus memperhatikan orientasi publik terkait keterbukaan informasi, keamanan, siber, integrasi teknologi, serta keterlibatan aktif masyarakat karena dengan strategi yang tepat, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.

### ***Tahapan Implementasi Inovasi Digital***

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang digitalisasi dalam akuntabilitas publik, implementasi inovasi digital perlu dilakukan secara sistematis. Berikut adalah tahapan utama yang dapat diadopsi oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan praktik global dan konteks lokal:

#### *Perencanaan dan Penilaian Awal*

Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan spesifik, seperti analisis kesenjangan digital di daerah tertentu, penilaian risiko keamanan data, dan pemetaan stakeholder (misalnya, aparatur, masyarakat, dan lembaga independen). Pemerintah dapat menggunakan alat seperti *SWOT analysis* untuk menentukan prioritas inovasi, seperti pengembangan platform *e-budgeting* atau sistem pengaduan online.

#### *Desain dan Pengembangan Sistem*

Pada tahap ini, dilakukan desain prototipe inovasi digital, seperti integrasi teknologi AI untuk analitik data atau blockchain untuk keamanan transaksi. Kolaborasi dengan ahli IT dan pemangku kepentingan penting untuk memastikan sistem sesuai dengan regulasi nasional (misalnya, UU No. 14/2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik) dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

#### *Implementasi dan Pelatihan*

Sistem digital diuji coba (*piloting*) di daerah tertentu sebelum roll-out nasional. Pelatihan literasi digital diberikan kepada aparatur dan masyarakat, termasuk program edukasi untuk mengatasi resistensi birokrasi dan meningkatkan partisipasi publik. Misalnya, kampanye nasional untuk penggunaan aplikasi seperti LAPOR! atau JAGA KPK.

#### *Monitoring dan Evaluasi*

Setelah implementasi, lakukan pemantauan berkala menggunakan dashboard real-time untuk mengukur efektivitas, seperti tingkat transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengurangan kesalahan pelaporan. Evaluasi dampak dilakukan melalui survei atau analitik data untuk mengidentifikasi masalah seperti overload informasi atau kebocoran data.

#### *Peningkatan Berkelanjutan dan Adaptasi*

Berdasarkan feedback, sistem diperbarui secara berkala dengan teknologi terbaru, seperti integrasi big data atau kolaborasi internasional untuk keamanan siber. Ini memastikan inovasi tetap responsif terhadap perubahan, seperti peningkatan pengguna internet di Indonesia yang mencapai 80,66% pada 2025. Tahapan ini memerlukan komitmen politik dan investasi infrastruktur untuk mencapai akuntabilitas publik yang berkelanjutan, transparan, dan inklusif.

### **Kesimpulan**

Digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan akuntabilitas publik melalui peningkatan transparansi, efisiensi, efektivitas pelayanan, serta perluasan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan teknologi seperti *Artificial Intelligence*, *big data analytics*, *Internet of Things*, dan berbagai platform layanan digital memungkinkan proses pelaporan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik berjalan lebih cepat, akurat, dan mudah diawasi oleh publik. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena akses informasi menjadi lebih terbuka, terintegrasi, dan mudah dijangkau. Namun, penerapan digitalisasi akuntabilitas publik masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi, seperti kesenjangan digital antarwilayah, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat, risiko keamanan data dan privasi, resistensi budaya birokrasi, serta belum sinkronnya regulasi terkait tata kelola digital di berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu, arus informasi yang berlebihan dan maraknya disinformasi juga berpotensi melemahkan akuntabilitas dan kepercayaan publik jika tidak ditangani secara serius.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, inovasi strategis perlu diarahkan pada: (1) penguatan regulasi dan standar nasional digital agar sistem informasi antarlembaga dapat terhubung secara terpadu; (2) peningkatan literasi digital melalui pelatihan berkelanjutan bagi aparatur dan masyarakat; (3) pemerataan infrastruktur digital di seluruh daerah; (4) pembangunan sistem keamanan siber nasional yang kuat dengan memanfaatkan teknologi seperti

*blockchain, big data analytics, multi-factor authentication, serta data encryption*; dan (5) penguatan kolaborasi internasional, termasuk dengan pusat-pusat pertahanan siber global seperti NATO CCDCOE. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah dapat membangun ekosistem akuntabilitas publik yang lebih transparan, responsif, dan berkelanjutan. Transformasi digital bukan hanya memperbaiki kualitas tata kelola, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terbentuknya pemerintahan yang modern, terpercaya, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat di era digital.

## Referensi

Alim, M. S., & Ibrahim, R. (2024). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digital Desa Moluo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3793-3802.

Aprilia, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321-334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Daraba, D. (2019). *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik*. Makassar: Leisyah.

Dunggio, R., Mahmud, S. I., & Sihira, S. S. (2025). Birokrasi Di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Reearch*, 5(4), 3871-3879.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.

Faisal, M. (2025). Regulasi dan Tantangan Hukum Penggunaan AI di Sektor Publik dalam Risiko, Akuntabilitas, dan Kebijakan Strategi. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(1), 109-116.

Gobang, P. W., Seran, K. D., Berun, D., & Satyawardana, . (2024). Krisis Kepercayaan: Refleksi Filsafat Manusia terhadap Kerentanan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 226-233. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11521546>.

Hasanah , A. U., Andaryani, S., Dwikurniawati, I. U., & Lestari, D. P. (2024). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital: Tantangan dan Peluang. *Journal Of Social Science Research*, 4(5), 5228-5235.

<https://www.apjii.or.id/>. (2025). diakses pada 13 Nopember 2025.

- Irfan, & Anirwan. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesia Journal of Intellectual Publication*, 4(1).
- Kurniawan, S. (2025). Transformasi Hukum Administrasi di Era Digital Tantangan dan Peluang untuk Pemerintahan yang Transparan di Kota Probolinggo. *Journal Of Law And Social Society*, 2(1). <https://doi.org/10.70656/jolasos.v2i1.249>.
- Mappisabbi, F., Haris, A., & Zuhri, W. (2024). Implementasi E-Goverment dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Era Digital. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 174-184. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i2.2036>.
- Nababan, N., Sagala, C. F., Aloma, L. A., & Manalu, S. (2025). Peran Warga Negara dalam Mengawasi Transparansi Anggaran Publik di Era Digital. *Jurnal Masyarakat Hukum dan Pendidikan Harapan*, 5(1).
- Natika, L. (2024). Transformasi Pelayanan Publik Di Era Digital: Menuju Pelayanan Masa Depan Yang Lebih Baik, 6(1). <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>.
- Rajagukguk, G. J., Simanjuntak, L., Pane, M. G., Rizal, M., Harmain, H., & Hamidah. (2025). Evolusi Teori Akuntansi Sektor Publik: Analisis Perkembangan dan Tantangan di Era Digital. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 11-18.
- Wardana, I. N., & Prabawati, N. A. (2024). Efektivitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance di Era Digital. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(5). <https://doi.org/10.61292/shkr.178>.